

Green Economy : Solusi Inklusif untuk Tantangan Lingkungan dan Sosial

Miftaqul Qoiriyah*, Syaharani Cahyani Pramesti, Fitri Wulandari
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya
e-mail: 21011010187@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Analisis ini menggali potensi ekonomi hijau sebagai solusi strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Hasil menunjukkan bahwa ekonomi hijau mampu menciptakan peluang kerja baru, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memperluas akses terhadap energi terbarukan. Namun, tantangan seperti tingginya kebutuhan pembiayaan dan resistensi dari sektor konvensional tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Kolaborasi erat antara pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam mempercepat transisi ini. Pengembangan lebih lanjut dianjurkan untuk mengeksplorasi dampak sosial ekonomi hijau, melalui studi kasus di negara-negara berkembang, serta meneliti sinergi antara kebijakan pemerintah dan teknologi hijau. Dengan demikian, analisis ini menawarkan wawasan komprehensif mengenai transformasi ekonomi hijau menuju pembangunan berkelanjutan, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan strategis yang lebih mendalam untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Kata kunci—Ekonomi Hijau, Kebijakan Hijau, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This analysis explores the potential of the green economy as a strategic solution to achieve sustainable development, emphasizing the balance between economic growth, environmental conservation, and social justice. Results show that the green economy can create new job opportunities, reduce greenhouse gas emissions, and expand access to renewable energy. However, challenges such as high financing needs and resistance from conventional sectors remain obstacles that need to be overcome. Close collaboration between stakeholders is a key element in accelerating this transition. Further development is recommended to explore the socio-economic impacts of green, through case studies in developing countries, as well as examining synergies between government policies and green technologies. As such, this analysis offers comprehensive insights into the transformation of the green economy towards sustainable development, while highlighting the need for a more in-depth strategic approach to address the challenges.

Keywords—Green Economy, Green Policies, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks mendorong penerapan konsep *green economy*. *Green economy* diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial [1]. *Green Economy* merupakan sebuah konsep yang berkembang pesat dalam konteks pembangunan berkelanjutan global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mendorong keadilan sosial, dan

secara signifikan mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis. *Green economy* menekankan integrasi antara 3 pilar utama pembangunan berkelanjutan, antara lain ekonomi, lingkungan dan sosial. Melalui penggunaan energi terbarukan, inovasi teknologi ramah lingkungan dan kebijakan fiskal yang mendukung, *green economy* diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat dengan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Dalam era ketidakpastian lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, perekonomian hijau menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Konsep ini memperkenalkan model ekonomi yang berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan inklusi sosial yang meningkatkan kesejahteraan bersama [2].

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan ketimpangan sosial, penerapan *green economy* menjadi semakin mendesak. Konsep ini tidak hanya sekadar alternatif bagi model ekonomi konvensional, tetapi juga sebuah keharusan untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam semua sektor, *green economy* bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga lingkungan hidup.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pendidikan lingkungan akan menjadi kunci dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek-proyek ramah lingkungan akan memastikan bahwa manfaat dari *green economy* dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *green economy*, kita tidak hanya berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan *green economy* dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, sekaligus memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. *Green economy* dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan ecotourism. Hal ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. *Green economy* juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke air bersih, sanitasi, dan energi yang berkelanjutan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan literatur dan studi kasus. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain dalam proses transisi ke *green economy*. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat disusun analisis yang komprehensif mengenai bagaimana konsep *green economy* ditetapkan secara inklusif dan efektif di berbagai negara serta tantangan apa yang masih harus diatasi untuk mencapai keberlanjutan global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi dan Konsep *Green Economy*

Green economy atau ekonomi hijau adalah sebuah paradigma ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau merupakan suatu pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan manusia serta mewujudkan keadilan sosial, dengan tetap menjaga lingkungan dari ancaman kerusakan dan kelangkaan sumber daya alam [3]. Esensi dari konsep ini adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan inklusi sosial. Ekonomi hijau menekankan pentingnya mengurangi risiko lingkungan seperti emisi karbon, degradasi ekosistem, serta mengatasi tantangan sosial, seperti ketimpangan dan kemiskinan. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara harmonis, ekonomi hijau berupaya menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan planet.

Barbier (2011) menggarisbawahi bahwa keberhasilan ekonomi hijau sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tiga tantangan krusial yang saling terkait. Pertama, pentingnya mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung secara optimal tanpa merusak kelestarian lingkungan. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air dan lahan, serta teknologi ramah lingkungan yang dapat meminimalkan limbah. Kedua, ekonomi hijau harus mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan tersebar secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang dapat timbul dalam proses transformasi ekonomi. Ketiga, ekonomi hijau harus berjalan dalam skala yang berkelanjutan, artinya kegiatan ekonomi harus selalu mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh melebihi kapasitas alam untuk memulihkan diri, sehingga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan batasan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

3.2 Manfaat *Green Economy*

Implementasi ekonomi hijau memberikan berbagai manfaat di tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan

sosial. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga aspek tersebut:

a. **Ekonomi:**

Dari sudut pandang ekonomi, *green economy* membuka peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja hijau, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan, seperti di sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, inovasi teknologi hijau juga meningkatkan efisiensi energi, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing global. Menurut penelitian dari OECD (2012), transisi menuju *green economy* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketidakstabilan yang dihasilkan oleh perubahan iklim dan ketergantungan terhadap sumber daya alam yang terbatas [4],[5].

b. **Lingkungan:**

Pengurangan emisi karbon dapat dicapai secara signifikan melalui implementasi teknologi bersih dan peningkatan efisiensi energi, yang diperkirakan mampu menurunkan emisi global sebesar 40-70% pada tahun 2050 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2010 [6]. Upaya ini sejalan dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan, yang terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Menurut International Renewable Energy Agency [7], energi terbarukan telah menyumbang 29% dari total produksi listrik global pada tahun 2020, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai contoh, laporan FAO (2020) menunjukkan bahwa penerapan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan telah memberikan hasil positif di beberapa negara. Vietnam, misalnya, berhasil meningkatkan tutupan hutannya dari 28% menjadi 42% dalam rentang dua dekade, mencerminkan potensi besar dari strategi pengelolaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Semua langkah ini

menunjukkan bagaimana transisi ke arah ekonomi hijau tidak hanya berdampak positif terhadap pengurangan emisi dan peningkatan energi terbarukan, tetapi juga berperan penting dalam pelestarian ekosistem dan sumber daya alam.

c. Sosial:

Green economy dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif bagi kelompok rentan, seperti perempuan, kaum muda, dan masyarakat miskin. Program pelatihan kerja hijau membantu meningkatkan keterampilan masyarakat yang kurang terlatih untuk berpartisipasi dalam ekonomi baru. Selain itu, *green economy* juga mempromosikan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dalam sektor-sektor baru yang berkembang, seperti energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam.

3.3 Tantangan yang Dihadapi

a. Tantangan Ekonomi

Pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi yang sangat besar. Menurut estimasi dari New Climate Economy (2018), diperlukan investasi sebesar \$90 triliun dalam infrastruktur global hingga tahun 2030 untuk mendukung peralihan ini [8]. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan memperluas penggunaan teknologi hijau. Namun, tantangan lain muncul dari resistensi sektor-sektor konvensional, terutama yang terkait dengan bahan bakar fosil. Penelitian oleh Mercure et al. (2018) menunjukkan bahwa transisi energi dapat menyebabkan penurunan nilai aset fosil hingga mencapai \$4 triliun secara global [9], menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian besar bagi sektor-sektor ini. Selain itu, meskipun biaya energi terbarukan terus mengalami penurunan, beberapa teknologi hijau, seperti penyimpanan energi, masih tergolong mahal, sebagaimana dilaporkan oleh IRENA (2020) [7]. Tingginya biaya ini dapat menjadi hambatan bagi adopsi teknologi hijau secara luas, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan anggaran. Oleh

karena itu, pembiayaan yang cukup dan strategi untuk mengatasi resistensi dari industri konvensional sangat penting untuk memperlancar transisi ke ekonomi rendah karbon.

b. Tantangan Sosial

Perubahan gaya hidup menuju keberlanjutan mulai mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat global, dengan 73% konsumen menyatakan kesiapan mereka untuk mengubah kebiasaan konsumsi demi mengurangi dampak lingkungan, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Nielsen [10]. Namun, meskipun kesadaran ini meningkat, implementasinya di lapangan masih terbatas karena berbagai hambatan, termasuk ketidakterdediaan produk ramah lingkungan dan harga yang lebih tinggi. Selain itu, distribusi manfaat dari transisi hijau sering kali tidak merata. World Inequality Report (2021) mengungkapkan bahwa 10% populasi terkaya di dunia bertanggung jawab atas 48% emisi karbon global, menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam pembagian tanggung jawab dan keuntungan dari langkah-langkah keberlanjutan [11]. Hal ini memperlihatkan bagaimana mereka yang paling banyak berkontribusi terhadap polusi lingkungan belum sepenuhnya ikut dalam upaya transisi hijau. Akses terhadap teknologi hijau juga masih menjadi masalah di negara-negara berpenghasilan rendah. UNCTAD (2020) melaporkan bahwa negara-negara ini hanya menerima 0,2% dari total investasi global dalam teknologi rendah karbon, yang menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam transisi energi bersih [12]. Masalah ini menyoroti kebutuhan akan dukungan global dan kolaborasi lebih kuat dalam memastikan bahwa manfaat dari ekonomi hijau dapat dirasakan oleh semua kalangan, tanpa memandang tingkat pendapatan.

c. Tantangan Lingkungan

Pengelolaan limbah dari teknologi hijau, seperti panel surya, menjadi tantangan serius seiring meningkatnya adopsi energi terbarukan. International Renewable Energy Agency (IRENA, 2016) memperkirakan bahwa limbah dari panel surya secara global akan mencapai 78 juta ton pada tahun 2050,

yang menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan sampah elektronik yang ramah lingkungan [7]. Meskipun energi terbarukan diharapkan mengurangi dampak lingkungan, fasilitas-fasilitas ini juga memiliki potensi merusak ekosistem. Studi oleh Rehbein et al. (2020) mengungkapkan bahwa 2.206 fasilitas energi terbarukan saat ini beroperasi di dalam kawasan yang dilindungi, menimbulkan risiko konflik dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati di daerah tersebut [13]. Hal ini menunjukkan bahwa meski teknologi hijau bermanfaat untuk mengurangi emisi karbon, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan ekosistem penting. Selain itu, kompleksitas perubahan iklim membuat tantangan semakin berat. IPCC (2021) menegaskan bahwa meskipun ada upaya pengurangan emisi secara agresif, beberapa dampak perubahan iklim sudah mencapai titik yang mungkin tidak dapat dibalikkan, seperti kenaikan permukaan laut dan pencairan es kutub [7]. Ini menunjukkan bahwa tindakan mitigasi harus segera diimbangi dengan strategi adaptasi untuk menghadapi dampak jangka panjang yang tak terelakkan.

3.4 Studi Kasus

Studi kasus penerapan *green economy* di beberapa negara memberikan wawasan yang berharga tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang pengalaman Jerman, negara-negara Nordik, dan beberapa inisiatif di Afrika.

a. Jerman

Jerman telah mengambil langkah maju yang signifikan dalam transisi menuju *green economy* melalui kebijakan *Energiewende*, yang merupakan rencana ambisius untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 1990 [14],[15].

- Keberhasilan:

1. Pangsa Energi Terbarukan: Jerman berhasil meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi

menjadi lebih dari 40% pada tahun 2020, berkat investasi besar-besaran dalam sumber energi seperti angin dan solar [16].

2. Lapangan Kerja Hijau: Sektor energi terbarukan diperkirakan telah menciptakan sekitar 300.000 pekerjaan baru pada tahun 2020 [15].

- Tantangan:

1. Pembiayaan Transisi: Meskipun sukses, Jerman menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan untuk transisi ini. Kenaikan biaya energi dan tantangan dalam pembaharuan infrastruktur menjadi isu utama [14].
2. Resistensi dari Sektor Industri Lama: Terdapat resistensi dari sektor industri yang tergantung pada energi fosil, yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan ini.

Pemerintah Jerman berencana untuk memproduksi setidaknya 80% energinya dari sumber terbarukan hingga tahun 2030, dengan target hampir 100% pada tahun 2035. Rencana ini mencakup peningkatan kapasitas energi angin dan solar secara signifikan, serta pengurangan prosedur perencanaan untuk mempercepat ekspansi energi terbarukan [14].

Transisi Jerman menuju ekonomi hijau melalui kebijakan *Energiewende* menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan besar. Keberhasilan dalam meningkatkan pangsa energi terbarukan dan penciptaan lapangan kerja hijau merupakan langkah positif, namun diperlukan strategi yang lebih kuat untuk mengatasi hambatan yang ada agar tujuan jangka panjang dapat tercapai.

b. Negara-Negara Nordik

Negara-negara Nordik, termasuk Swedia, Norwegia, dan Denmark, dikenal karena kebijakan lingkungan yang progresif dan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Swedia dan Denmark telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan energi terbarukan, meskipun mereka juga menghadapi tantangan tertentu.

- Keberhasilan:

1. Swedia

Swedia berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 27% antara tahun 1990 dan 2019, sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Mereka memiliki salah satu sistem perpajakan karbon tertinggi di dunia, yang mendorong penggunaan energi terbarukan [17].

2. Denmark

Denmark merupakan pemimpin dunia dalam energi angin, dengan lebih dari 47% dari total konsumsi listriknya berasal dari energi angin pada tahun 2019 [18]. Negara ini telah berinvestasi besar dalam infrastruktur energi terbarukan dan memecahkan rekor dalam produksi listrik dari sumber angin.

● Tantangan

Meskipun keberhasilan ini, negara-negara Nordik juga menghadapi tantangan terkait ketidakadilan sosial dan distribusi manfaat dari transisi energi. Ada kekhawatiran bahwa kelompok rentan mungkin tidak mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan lingkungan yang ada [17].

Keberhasilan Swedia dan Denmark dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan menunjukkan potensi besar dari kebijakan ekonomi hijau. Namun, tantangan terkait ketidakadilan sosial perlu diatasi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari transisi energi ini.

c. Afrika

Proyek energi terbarukan *Desertec* di Afrika, yang bertujuan untuk memanfaatkan energi matahari dari wilayah Sahara, memiliki potensi besar dalam menyediakan solusi energi bersih bagi banyak negara di benua ini. Namun, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan.

● Keberhasilan

1. Potensi Infrastruktur Energi: *Desertec* menawarkan peluang besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi yang dapat menyuplai energi ke negara-negara Eropa dan Afrika Utara. Proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja

dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal [19].

2. Energi Bersih: Dengan memanfaatkan kekuatan matahari di Sahara, *Desertec* dapat menghasilkan energi hijau yang melimpah, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dioksida.

● Tantangan

1. Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur yang ada menjadi kendala utama dalam penerapan ekonomi hijau di wilayah ini. Membangun jaringan listrik yang diperlukan untuk mentransfer energi dari Sahara ke Eropa memerlukan investasi besar dan waktu yang lama.

2. Pendanaan dan Dukungan Politik: Tantangan dalam hal pendanaan dan kurangnya dukungan politik di beberapa negara juga menjadi hambatan. Banyak negara di kawasan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan energi domestik mereka terlebih dahulu sebelum berkomitmen untuk proyek ekspor

3. Ketidakpastian Politik dan Sosial: Ketidakpastian politik dan sosial di beberapa negara juga dapat menghambat kemajuan proyek-proyek ini. Stabilitas politik sangat penting untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan proyek jangka panjang.

Proyek *Desertec* memiliki potensi yang signifikan untuk menyediakan solusi energi bersih di Afrika dan Eropa. Namun, tantangan terkait infrastruktur, pendanaan, dukungan politik, serta ketidakpastian sosial perlu diatasi agar proyek ini dapat terwujud secara efektif. Upaya kolaboratif antara negara-negara di kawasan MENA dan Eropa sangat penting untuk mewujudkan visi energi terbarukan yang berkelanjutan dari Sahara.

Pengalaman dari Jerman, negara-negara Nordik, dan Afrika menunjukkan bahwa penerapan *green economy* dapat memberikan manfaat signifikan, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Keberhasilan ini dapat dijadikan pelajaran untuk negara lain yang ingin mengadopsi

prinsip-prinsip *green economy* dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

3.5 Indikator Keberhasilan *Green Economy*

Keberhasilan implementasi *green economy* dapat diukur dengan beberapa indikator yang mencerminkan dampak positif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Indikator-indikator ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif tetapi juga kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan mereka dalam menghadapi perubahan iklim.

a. Pertumbuhan Lapangan Kerja Hijau

Salah satu indikator utama keberhasilan *green economy* adalah peningkatan lapangan kerja hijau di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan transportasi bersih. Menurut ILO (2018), transisi menuju *green economy* diperkirakan dapat menciptakan hingga 24 juta pekerjaan baru di seluruh dunia pada tahun 2030 [15]. Pekerjaan hijau tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang berpotensi merusak lingkungan.

b. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Pengurangan emisi gas rumah kaca secara konsisten di wilayah yang menerapkan ekonomi hijau merupakan indikator penting lainnya. Laporan dari UNEP (2011) menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dapat mengurangi emisi global hingga 50% pada tahun 2050, jika langkah-langkah yang tepat diterapkan [16]. Hal ini sangat penting untuk memenuhi target Perjanjian Paris dan mencegah pemanasan global di atas 1,5°C.

c. Peningkatan Akses Energi Terbarukan

Peningkatan akses terhadap energi terbarukan untuk masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, adalah indikator signifikan dari keberhasilan *green economy*. Menurut laporan dari REN21 (2020), penggunaan energi terbarukan telah meningkat secara dramatis, dengan lebih dari 1,2 miliar orang di dunia saat ini memiliki akses ke energi terbarukan. Akses ini tidak

hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan sumber energi yang bersih dan terjangkau.

d. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Yang Meningkat Di Wilayah Dengan Penerapan Ekonomi Hijau

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan indikator yang sangat penting. Sebuah studi oleh PNUD (2020) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan *green economy* secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam HDI mereka, berkat perbaikan dalam kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dengan meningkatnya kualitas hidup, masyarakat dapat lebih produktif dan berpartisipasi dalam ekonomi secara lebih aktif.

e. Indikator Ketahanan Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Indikator ketahanan sosial sangat penting dalam konteks perubahan iklim. Masyarakat yang mampu beradaptasi dan tetap produktif di tengah tantangan lingkungan menunjukkan keberhasilan implementasi *green economy*. Menurut laporan oleh IPCC (2018), ketahanan sosial meliputi kemampuan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi risiko, termasuk dampak perubahan iklim. Penguatan jaring pengaman sosial dan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan hijau merupakan langkah-langkah yang penting untuk membangun ketahanan ini [6].

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini tidak hanya membantu dalam menilai keberhasilan *green economy*, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan dan praktik yang berkelanjutan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan emisi, akses energi terbarukan, peningkatan kualitas hidup, dan ketahanan sosial, *green economy* dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.6 Rekomendasi dan Strategi ke Depan

Penerapan ekonomi hijau memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat transisi menuju masa depan yang berkelanjutan. OECD (2020) menegaskan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam mengakselerasi ekonomi hijau, di mana sektor publik menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta membawa inovasi dan investasi [5]. Selain itu, Green Climate Fund (2021) melaporkan bahwa pembiayaan internasional sangat penting, dengan komitmen \$10 miliar untuk proyek-proyek hijau di negara-negara berkembang. Namun, pembiayaan saja tidak cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat lokal. UN Global Compact (2021) menekankan bahwa pelibatan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek hijau akan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Di bidang teknologi, World Economic Forum (2021) mengidentifikasi sejumlah teknologi terobosan yang dapat mempercepat transisi ini, tetapi inovasi teknologi harus diimbangi dengan pendidikan yang memadai. UNESCO (2020) merekomendasikan integrasi pendidikan berkelanjutan ke dalam kurikulum nasional untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi hijau. Terakhir, harmonisasi kebijakan lintas sektor, sebagaimana disarankan oleh OECD (2021), sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial saling mendukung dalam mencapai tujuan ekonomi hijau.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi hijau merupakan pendekatan yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Implementasi ekonomi hijau terbukti dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan akses terhadap energi terbarukan. Namun, tantangan seperti kebutuhan pembiayaan yang tinggi dan

resistensi dari sektor konvensional masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai manfaat ekonomi hijau dan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung transisi ini. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar penelitian lebih lanjut mengeksplorasi dampak sosial dari ekonomi hijau dan melakukan studi kasus di negara-negara berkembang, sehingga dapat memahami tantangan dan solusi yang lebih spesifik. Secara keseluruhan, ekonomi hijau menunjukkan potensi besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada.

5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk peneliti berikutnya dan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Pertama, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih fokus pada analisis dampak sosial dari penerapan *green economy*, terutama dalam konteks kelompok rentan. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana transisi ini mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat.

Kedua, penting untuk mengembangkan studi kasus yang lebih mendalam mengenai kebijakan *green economy* di negara-negara berkembang. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dan strategi yang berhasil diimplementasikan.

Selanjutnya, peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan antara teknologi hijau dan kebijakan pemerintah, untuk memahami bagaimana dukungan kebijakan dapat mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Terakhir, penelitian lebih lanjut tentang evaluasi efektivitas program-program *green economy* yang telah diterapkan akan sangat bermanfaat. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengikuti saran-

saran ini, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan dan implementasi *green economy*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada para peneliti dan akademisi yang telah memberikan wawasan berharga melalui literatur yang telah ditinjau. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga dan organisasi yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis menghargai masukan dan kritik konstruktif dari rekan-rekan sejawat yang telah membantu memperbaiki kualitas penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi hijau di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Novianti, "Green Constitution Dalam Mendorong *Green Economy*," vol. 42, pp. 256–263, 2024.
- [2] N. Rahmawati and .Ketut, I Bayangkara, "Peran *Green Economy* dalam Meningkatkan Aspek Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Studi Literatur)," *J. Ekon. Akunt. dan Manaj.*, vol. 3, no. 3, pp. 289–301, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2758>
- [3] P. Eradication, "The green tinge of success: How green innovation can give micro-firms a competitive edge," *Strateg. Dir.*, vol. 35, no. 3, pp. 23–24, 2019, doi: 10.1108/SD-12-2018-0248.
- [4] OECDGreen Growth and Developing Countries, "Green Growth and Developing Countries," no. June, pp. 4–45, 2012, [Online]. Available: www.oecd.org/greengrowth
- [5] H. Jordi Andrea, Fitri Sakinah2, Nurhizrah Gistituat3, "MERDEKA BELAJAR DALAM REVOLUSI PENDIDIKAN INDONESIA DI ERA DISRUPSI," *Ayan*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.
- [6] R. Hood, "Global Warming," *A Companion to Appl. Ethics*, pp. 674–684, 2007, doi: 10.1002/9780470996621.ch50.
- [7] I. Renewable, E. Agency, and A. O. Fao, *Renewable Energy and Agri-food Systems: Advancing Energy and Food Security towards Sustainable Development Goals*. 2021. doi: 10.4060/cb7433en.
- [8] A. Climate, A. In, and U. Times, "UNCLOCKING THE INCLUSIVE GROTH STORY OF THE 21ST CENTURY: ACCELERATING CLIMATE ACTION IN URGENT TIMES," 2018, [Online]. Available: https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NC_E_2018_ExecutiveSummary_FINAL.pdf
- [9] D. J. Kuss, M. D. Griffiths, J. F. Binder, and B. Street, "Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets.," pp. 1–19, 2013.
- [10] A. Krystallis, K. G. Grunert, M. Barcellos, T. Perrea, and W. Verbeke, "Consumer attitudes towards sustainability aspects of food production: Insights from three continents," *J. Mark. Manag.*, vol. 28, pp. 334–372, Mar. 2012, doi: 10.1080/0267257X.2012.658836.
- [11] G. Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, "World inequality report," *Belkn. Press.*, vol. 70, no. 9, pp. 474–477, 2018.
- [12] UNCTAD, *International production beyond the pandemic*. 2020.
- [13] J. A. Rehbein *et al.*, "Renewable energy development threatens many globally important biodiversity areas," *Glob. Chang. Biol.*, vol. 26, no. 5, pp. 3040–3051, 2020, doi: 10.1111/gcb.15067.
- [14] Á. Pelegry, E. Ortiz Martínez, and I. Menéndez Sánchez, "The German

- Energy Transition (Energiewende) Policy, Energy Transformation and Industrial Development,” *Ger. Energy Transit. (Energiewende) Policy, Energy Transform. Ind. Dev.*, no. May, p. 203, 2016, [Online]. Available:
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/cuadernos/Energiewende_English.pdf
- [15] ILO, *World Employment and Social Outlook: Greening with jobs*. 2018.
- [16] Agora Energiewende and Ember, “The European Power Sector in 2020: Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition,” p. 18, 2021, [Online]. Available:
<https://www.agora-energiewende.de/en/press/news-archive/renewables-overtake-gas-and-coal-and-coal-in-eu-electricity-generation-1/>
- [17] O. Tynkkynen, *Nordic Green to Scale for countries*: 2018. doi: 10.6027/anp2018-764.
- [18] Danish Energy Agency, “Denmark’s Energy and Climate Outlook 2019: Baseline Scenario Projection Towards 2030 with Existing Measures (Frozen Policy),” p. 87, 2019, [Online]. Available:
<http://www.ens.dk/outlook>
- [19] H. Adun, H. P. Ishaku, and A. T. Ogungbemi, “Towards Renewable energy targets for the Middle East and North African region: A decarbonization assessment of energy-water nexus,” 2022, [Online]. Available:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622035168>
-